

## PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI TANAH PAPUA

[Aniek Juliarini]<sup>a</sup>, [Agung Widi Hatmoko]<sup>b</sup>

<sup>a</sup> [Balai Diklat Keuangan Yogyakarta] Email: [ajuliarini@gmail.com](mailto:ajuliarini@gmail.com); aniek.juliarini@kemenkeu.go.id]

<sup>b</sup> [Balai Diklat Keuangan Yogyakarta] Email: [wedee99@gmail.com](mailto:wedee99@gmail.com)]

### ABSTRAK

*The Human Development Index (HDI) in Papua (Papua and West Papua Provinces) was the lowest in Indonesia for several years. One of the special sources of regional income for these provinces is the Special Autonomy (Otsus) Fund. This study analyze the effect of the Otsus Fund on HDI in Papua and West Papua Provinces. The provinces was chosen because they have the lowest HDI in Indonesia, located on the same island, and the recipients of Otsus Fund. Secondary data from the realization of the Regional Budget and Revenue (APBD) obtained from the Ministry of Finance website, or other sources, HDI data from the Statistics Indonesia (BPS), and other data were analyzed. The results showed that in the two provinces, the Otsus Fund have a positive relationship in HDI. Every addition to the Otsus Fund increases the HDI, but the increases are very small. This can be caused by geographic, demographic, sociological factors, or local government policies. Every one billion additional Otsus Fund in Papua Province increases the HDI by 0.001, while in West Papua increases by 0.002. The results of the research can be used to evaluate the utilization and optimization of the Otsus Fund in Papua land.*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tanah Papua selama beberapa tahun adalah yang terendah di Indonesia. Salah satu sumber pendapatan daerah yang khusus bagi dua provinsi, Papua dan Papua Barat, adalah Dana Otonomi Khusus (Otsus). Kajian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh Dana Otsus terhadap IPM di Provinsi Papua dan Papua Barat. Provinsi tersebut dipilih karena memiliki IPM terendah di Indonesia, terletak di pulau yang sama, dan sama-sama penerima dana Otonomi Khusus. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) yang diperoleh dari laman Kementerian Keuangan, atau sumber lainnya, data IPM dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan data lain dari *website* kedua provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kedua provinsi, dana Otsus memiliki arah hubungan yang positif dengan IPM. Setiap penambahan Dana Otsus meningkatkan IPM namun peningkatannya sangat kecil. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor geografi, demografi, sosiologi, ataupun kebijakan pemerintah daerah setempat. Setiap tambahan pendapatan satu miliar di Provinsi Papua meningkatkan IPM sebesar 0,001, sementara di Provinsi Papua Barat meningkatkan IPM 0,002. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk mengevaluasi pemanfaatan dan optimalisasi Dana Otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kata kunci: Dana Otsus, Dana transfer, Papua Barat, Tanah Papua

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di provinsi ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Sumber-sumber pendapatan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 2004). Di Indonesia, kenaikan Pendapatan daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi-provinsi belum berjalan seimbang. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kebijakan pemerintah daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, dan lainnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, total pendapatan daerah provinsi di Indonesia tahun 2010 sebesar Rp 69.337 miliar dan pada tahun 2016 mencapai 279.342 miliar (Badan Pusat Statistik 2017). Rata-rata IPM seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2010 adalah 66,53 dan pada tahun 2016 mencapai rata-rata

70,18 (Badan Pusat Statistik 2017). Pada tahun 2016, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan IPM tertinggi yaitu mencapai 79,60, sedangkan Provinsi Papua menempati urutan terakhir dengan IPM 58,05. Pada tahun 2016, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan pendapatan tertinggi, yaitu mencapai Rp53.785 miliar, sementara provinsi dengan pendapatan terendah adalah Provinsi Gorontalo dengan Rp 1.584 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan IPM terendah belum tentu memiliki pendapatan yang rendah. Sebaliknya daerah dengan pendapatan tinggi tidak selalu memiliki IPM yang tinggi. Tabel 1 menunjukkan 5 wilayah dengan pendapatan teratas dan 5 provinsi dengan pendapatan terendah, serta peringkat IPM provinsi-provinsi tersebut pada tahun 2016.

Tabel 1. Provinsi dengan Pendapatan Teratas dan Terendah Tahun 2016  
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

PERINGKAT	PENDAPATAN (Milyar Rupiah)	PROVINSI	IPM	PROVINSI
1	53.785	DKI Jakarta	79,60	DKI Jakarta
2	27.694	Jawa Barat	78,38	DI Yogyakarta
3	24.962	Jawa Timur	74,59	Kalimantan Timur
4	19.633	Jawa Tengah	73,99	Kepulauan Riau
5	12.568	Papua	73,65	Bali
...	...	...	...	...
30	2.333	Kalimantan Utara	65,81	Nusa Tenggara Barat
31	2.023	Maluku Utara	63,60	Sulawesi Barat
32	1.950	Kep.Bangka Belitung	63,13	Nusa Tenggara Timur
33	1.688	Sulawesi Barat	62,21	Papua Barat
34	1.584	Gorontalo	58,05	Papua

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang tinggi tidak selalu diikuti dengan IPM yang tinggi pula. DKI Jakarta dengan pendapatan tertinggi sekaligus memiliki IPM tertinggi, namun Jawa Barat dan Jawa Timur di peringkat kedua dan ketiga tertinggi, tidak berada di peringkat 2 dan 3 pada IPM-nya. Begitu pula Provinsi Papua dengan pendapatan daerah di peringkat 5 tetapi memiliki IPM terendah di Indonesia (peringkat 34). Dengan demikian dapat dianalisis bahwa korelasi pendapatan daerah dengan IPM di setiap provinsi sangat berbeda. Hasil kinerja pembangunan ekonomi di Indonesia memberikan hasil yang berbeda antar daerah dan ini terjadi antarprovinsi di Indonesia, di mana perbedaan hasil pembangunan ekonomi menunjukkan disparitas ekonomi yang cukup besar antarprovinsi (Kusriyawanto 2014). Provinsi di pulau Jawa merupakan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, dan semua provinsi di Pulau Jawa berkinerja di atas rata-rata provinsi secara nasional (Juliarini 2019).

Dengan meningkatnya pendapatan daerah, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dana transfer dari pusat, menarik untuk dikaji bagaimana pendapatan daerah provinsi berpengaruh terhadap IPM di wilayahnya, terutama pada daerah dengan IPM rendah yang berarti memiliki kualitas hidup dan kualitas pembangunan manusia yang rendah pula. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wilayah otonomi khusus yang karenanya mendapatkan alokasi dana transfer yang cukup

besar, namun kondisi pelayanan publik dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan IPM dan pendapatan perkapita provinsi yang selalu di bawah rata-rata nasional, serta angka kemiskinan di atas rata-rata nasional (Widodo 2019). Urutan IPM terendah selama beberapa tahun ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. IPM Lima Provinsi dengan IPM Terendah tahun 2012 - 2016  
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

PERINGKAT	PROVINSI	TAHUN-IPM				
		2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Rerata Nasional</b>	<b>67,70</b>	<b>68,31</b>	<b>68,90</b>	<b>69,55</b>	<b>70,18</b>
30	Nusa Tenggara Barat	62,98	63,76	64,31	65,19	65,81
31	Sulawesi Barat	61,01	61,53	62,24	62,96	63,60
32	Nusa Tenggara Timur	60,81	61,68	62,26	62,67	63,13
33	Papua Barat	60,30	60,91	61,28	61,73	62,21
34	Papua	55,55	56,25	56,75	57,25	58,05

Tabel 2 menunjukkan bahwa IPM di tanah Papua, yang terbagi atas Provinsi Papua dan Papua Barat, lebih kecil dari rata-rata IPM Nasional dan merupakan IPM terendah di Indonesia. Di sisi lain, dari Tabel 1 terlihat bahwa Provinsi Papua memiliki pendapatan tertinggi kelima di Indonesia. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti bagaimana peranan pendapatan di kedua provinsi tersebut dalam mendorong peningkatan IPM. Agus (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di provinsi di Indonesia. PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap IPM sedangkan DBH berpengaruh negatif.

Penelitian ini mengambil objek wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat karena keduanya memiliki IPM yang terendah di Indonesia, terletak pada pulau yang sama, dan sama-sama merupakan wilayah otonomi khusus. Dana Otsus merupakan hal yang menarik dan penting untuk diteliti mengingat penyaluran Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah berjalan dua puluh tahun akan berakhir tahun 2021 mendatang. Hasil kajian ini juga akan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan terkait pemanfaatan dan optimalisasi dana tersebut. Penelitian ini telah didahului dengan penelitian awal dengan memasukkan beberapa variabel *predictor*, namun setelah melalui uji statistik, hanya satu variabel bebas yang dapat digunakan, dan dengan pertimbangan tersebut di atas, variabel bebas yang dipilih adalah variabel dana Otsus dan IPM sebagai variabel terikat/respon.

Rumusan penelitian ini adalah “Bagaimana hubungan dan pengaruh Dana Otsus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat?”. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis korelasi/hubungan antara Dana Otsus dengan IPM di Provinsi Papua dan Papua Barat;
2. menganalisis berapa besar pengaruh Dana Otsus terhadap IPM di Provinsi Papua dan Papua Barat.

## 2. STUDI LITERATUR

### 2.1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah terbentuk di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU nomor 22 tahun 1999 kemudian diganti dengan UU nomor 32 tahun 2004 dan terakhir diganti dengan UU nomor 9 tahun 2015. Sementara UU Perimbangan Keuangan dari UU nomor 25 tahun 1999 diganti dengan UU nomor 33 tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintah pada dasarnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan sesuai dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini karena daerah dianggap lebih paham terhadap kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang teramat luas maka untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah (Rusydi et al. 2015). Penerapan sistem otonomi daerah menuntut aparat pemerintah daerah dapat mengelola keuangan di daerahnya secara efektif dan efisien (Adyani & Wigiastuti 2018). Sesungguhnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa tujuan diselenggarakannya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Pendapatan daerah yang kuat akan memungkinkan Pemerintah mengeluarkan banyak uang untuk bekerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan manusia. Namun di sisi lain, semakin besar jumlah penerimaan suatu daerah tidak menjamin semakin besar pula pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Rusydi et al. 2015).

Dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Sumber pendapatan daerah provinsi berasal dari Pendapatan Daerah yang terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah, 2) Dana perimbangan, dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya. Hal ini merupakan perwujudan desentralisasi. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi, pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan pemerintah daerah lainnya. Dana Perimbangan ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>) diakses 16 September 2020.

Dana Perimbangan yang dialokasikan dari pusat ke daerah terdiri atas bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan dana transfer yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam upaya membantu kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya (Badan Pusat Statistik 2017). Sementara DAK dikhususkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lain. Pendapatan legal lainnya terdiri dari pendapatan hibah; dana darurat yaitu dana dari APBN yang dialokasikan untuk daerah yang mengalami bencana nasional, kejadian luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil perpajakan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; bantuan *kontingensi/balancing/penyesuaian* dari pemerintah; bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan sah lainnya (Badan Pusat Statistik, 2017).

Provinsi Papua, sebagai bagian Negara Republik Indonesia, telah diberikan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 21 tahun 2001 jo. UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat. Alasan otonomi khusus adalah bahwa pengelolaan dan penggunaan kekayaan alam Tanah Papua belum dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan standar hidup penduduk pribumi. Akibatnya terjadi kesenjangan yang cukup besar antara Provinsi Papua dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu tujuan Otonomi Khusus adalah untuk membantu Papua dan warga Papua menikmati standar hidup serta kesempatan seperti daerah lainnya di Indonesia (*World Bank & Australian Indonesia Partnership* 2009). Dana Otsus merupakan salah satu jenis belanja Transfer Ke Daerah dalam APBN yang besarnya ditentukan dalam persentase tertentu dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Dana Otsus Papua dan Papua Barat ditentukan setara 2 persen dari pagu DAU nasional dan berlaku selama 20 tahun (2002-2021) (<https://fiskal.kemenkeu.go.id>, 2020).

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masing-masing berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan dan penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menghormati hak asasi manusia (HAM) Provinsi Papua, khususnya masyarakat adat Papua (BPKAD Provinsi Papua 2017).

Pemberian Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya ditujukan untuk mendukung percepatan penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia. Dana otsus diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat Papua agar terdapat pemerataan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia. Di bidang Keuangan Daerah, kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua terkait penyelenggaraan Otonomi Khusus berupa Pos Penerimaan Khusus Pelaksanaan

Otonomi Khusus yang setara dengan 2% (dua persen) dari Dana Alokasi Umum Nasional. Dana otsus terutama diperuntukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta Dana Tambahan Infrastruktur yang utamanya ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur (BPKAD Provinsi Papua 2017).

Dana Otonomi Khusus pertama kali dialokasikan pada tahun 2002 untuk Provinsi Papua, sedangkan Provinsi Papua Barat baru menerima Dana Otonomi Khusus pada tahun 2009, sebagai provinsi baru pemekaran dari Provinsi Papua. Selama periode 2002-2018, besaran Dana Otonomi Khusus bertambah setiap tahunnya. Perkembangan kinerja kesejahteraan dan indikator ekonomi di daerah otonomi khusus menunjukkan pencapaian yang semakin meningkat meskipun perbaikannya tidak secepat daerah lain (<https://fiskal.kemenkeu.go.id>, 2020). Rata-rata pertumbuhan IPM periode 2011-2017 di Papua sebesar 1,18 persen, dan Papua Barat sebesar 0,79 persen dengan rata-rata pertumbuhan IPM nasional sebesar 0,89 persen. Beberapa pencapaian indikator kesejahteraan dan perekonomian merupakan hasil capaian program pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD. Dana Otonomi Khusus diharapkan dapat berperan sebagai akselerator dalam percepatan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat, namun pertumbuhan beberapa indikator kesejahteraan masih di bawah rata-rata nasional (<https://fiskal.kemenkeu.go.id>, 2020).

## 2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*) merupakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan dalam pembangunan sosial ekonomi (Biggeri & Mauro 2018). Indeks Pembangunan Manusia dalam Laporan Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 dan diterbitkan secara teratur dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) tahunan. Laporan UNDP 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat 111 dari 189 negara di dunia, dengan HDI 0,707. Negara dengan indeks tertinggi adalah Norwegia dengan indeks 0,954, disusul Swiss dengan indeks 0,946. Sedangkan Malaysia, negara tetangga Indonesia berada di posisi 61 dengan indeks 0,804. Negara dengan HDI terendah adalah Nigeria dengan indeks 0,377 (UNDP, 2019).

HDI dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yang antara lain ditunjukkan oleh angka harapan hidup yang panjang, tingkat pendidikan yang dimiliki, dan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, HDI dapat menggambarkan tingkat perkembangan suatu daerah atau negara. IPM yang tinggi menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi sehingga dapat dimaknai sebagai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia yang terbagi dalam 34 provinsi memiliki keanekaragaman yang sangat besar, baik dari segi luas wilayah, kondisi alam, tingkat pendidikan masyarakat, dan jumlah penduduk. Hal ini menjadi tantangan bagaimana mensejahterakan masyarakat, di mana salah satunya tersebut ditunjukkan dengan tingginya IPM yang idealnya tidak terlalu jauh berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Supranto (2009) menyatakan bahwa salah satu tujuan analisis data adalah untuk menghitung pengaruh atau perubahan suatu peristiwa terhadap peristiwa lain. Setiap

kebijakan baik dari pemerintah maupun swasta selalu ditujukan untuk melakukan perubahan sesuai dengan keinginan/harapan, misalnya meningkatkan anggaran pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, atau meningkatkan pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Supranto 2009). Untuk tujuan evaluasi suatu kebijakan sering kali ingin diketahui besarnya pengaruh kuantitatif perubahan suatu peristiwa pada peristiwa lain, misalnya pengaruh perubahan pendapatan terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Jika kedua variabel tersebut saling berhubungan, maka perubahan nilai salah satu variabel (misalnya Pendapatan Asli Daerah) akan memengaruhi nilai variabel lainnya (misalnya IPM). Hubungan kedua variabel tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi, misalnya  $Y \text{ (IPM)} = f \text{ (Pendapatan Asli Daerah)}$ . Jika dipahami bentuk fungsinya, dengan mengetahui nilai satu variabel  $X$  (Pendapatan Asli Daerah) maka nilai variabel  $Y$  (IPM) dapat diestimasi. Untuk membuat prediksi dari variabel  $X$  maka  $X$  dan  $Y$  harus memiliki hubungan yang kuat. Kekuatan hubungan antara  $X$  dan  $Y$  diukur dengan koefisien korelasi, sedangkan besarnya pengaruh  $X$  terhadap  $Y$  diukur dengan koefisien regresi.  $X$  adalah variabel bebas dan  $Y$  adalah variabel terikat. Dalam regresi berganda, jumlah variabel bebas lebih dari satu (misalnya PAD, Dana Otsus, dll) yang digunakan untuk melihat hubungan terhadap sebuah variabel terikat (misalnya IPM).

Ekonom atau ahli di bidang lain sering menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan erat antar variabel. Terhadap data yang akan dilihat korelasinya, jika variabel bebas/prediktornya lebih dari satu maka dilakukan regresi linier berganda. Sebelum dilakukan proses regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Jika asumsi tidak terpenuhi maka estimasi parameter menjadi bias dan memberikan hasil pengujian hipotesis yang tidak tepat (Swan Statistik 2020). Uji normalitas untuk memenuhi asumsi bahwa *error* dari model harus menyebar normal. Pengujiannya dilakukan dengan visualisasi *normal probability plot*. Dalam hal ini, sebaran *error* harus cenderung berada pada garis diagonal. Uji Autokorelasi dilakukan untuk memenuhi harapan bahwa *error* antarpengamatan tidak berhubungan satu sama lain. Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Uji heteroskedastisitas untuk membuktikan bahwa *error* menyebar secara homogen. Uji ini dilakukan secara visualisasi, untuk melihat *plot* antar *residual* dan prediksi tidak membentuk pola tertentu. Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat bahwa antarvariabel prediktor tidak memiliki korelasi yang tinggi. Uji hipotesis regresi linier berganda dilakukan secara uji simultan dan uji parsial, sementara pada regresi linier sederhana dapat dilakukan dengan Uji F (Swan Statistik 2020)

Apabila ternyata hasil analisis menunjukkan hubungan yang cukup erat maka analisis dilanjutkan ke analisis regresi sebagai alat peramalan (*forecasting*) yang sangat berguna untuk perencanaan (Supranto 2009). Analisis korelasi yang mencakup dua variabel disebut analisis korelasi linier sederhana. Bentuk persamaannya adalah  $Y = C + a.X + e$ . Untuk mengetahui korelasi antarvariabel sendiri terdapat beberapa macam teknik korelasi yaitu korelasi Pearson Product Moment ( $r$ ), korelasi rasio ( $n$ ), Korelasi Rank Spearman ( $p$ ), Korelasi Biserial ( $rb$ ), dan lain sebagainya (Sugiyono, 2014). Pengolahan data statistik dapat dilakukan dengan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS)

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Yuliani, T (2015) dalam penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Kalimantan Timur mengungkapkan bahwa peningkatan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota disebabkan perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan antarwilayah. Sementara BPS menyatakan bahwa perbedaan wilayah merupakan konsekuensi logis dari perbedaan sifat alam, ekonomi, sosial dan budaya. Distribusi sumber daya alam khususnya migas, pertumbuhan pusat perdagangan dan industri yang terpusat di beberapa daerah telah menciptakan kantong-kantong pertumbuhan, sehingga tercipta ketimpangan yang tinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar daerah (Yuliani 2015).

Melliana, dkk (2013) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dengan mengolah data menggunakan regresi data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan IPM dapat dilakukan dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS), jumlah fasilitas kesehatan, persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan PDRB per kapita (Melliana et al. 2013).

Iskandar dan Subekan (2014) melakukan studi tentang kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam era desentralisasi fiskal terhadap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kinerja keuangan daerah sebagai variabel independen diwakili oleh tingkat otonomi, efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah. Kesejahteraan sosial sebagai variabel terikat diwakili oleh IPM. Hasil empiris menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Derajat otonomi daerah berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan efektivitas kinerja keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan efisiensi kinerja keuangan daerah secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Iskandar & Subekan 2014).

Sangh (2016) melakukan penelitian tentang determinan Indeks Pembangunan Manusia dengan analisis empiris lintas negara. Sangh menyimpulkan tentang determinan indeks pembangunan manusia seperti PDB per kapita, angka melek huruf, angka harapan hidup saat lahir, indeks Gini, angka kesuburan dan signifikansi emisi Co2 dalam analisis regresi empiris. Dalam analisis kebijakan regional disebutkan bahwa Eropa & Asia Tengah dan Amerika Latin, serta Karibia memiliki IPM yang lebih tinggi, sedangkan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara memiliki IPM yang lebih rendah. Peningkatan IPM dapat dicapai melalui tiga dimensi, yaitu indeks pendidikan, indeks pendapatan, dan indeks Kesehatan (Sangh 2016).

Dalam sebuah kajiannya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) antara lain menyimpulkan bahwa: 1) Berdasarkan tipologi Klassen, perekonomian Provinsi Papua dan Papua Barat dari tahun 2011 hingga 2017 termasuk dalam kategori daerah maju tetapi tertekan (pendapatan tinggi tetapi pertumbuhan rendah); 2) Belanja daerah per kapita, belanja daerah untuk fungsi pendidikan, dan untuk fungsi kesehatan di provinsi Papua dan Papua Barat tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, namun untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan prioritas penggunaan belanja daerah di masing-masing daerah; 3) Kinerja

indikator kesejahteraan dan ekonomi di Daerah Otonomi Khusus selama pelaksanaan Dana Otonomi Khusus periode 2011-2017 telah menunjukkan peningkatan, namun signifikansi pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap peningkatan kinerja indikator tersebut tidak bisa dijelaskan, terutama perannya dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di Daerah Otonomi Khusus. ; 4) Pemerintah perlu memberikan perhatian serius dalam menentukan strategi pada masa transisi menjelang berakhirnya Dana Otsus Papua dan Papua Barat. Mengingat bahwa latar belakang pembentukan Provinsi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat adalah karena faktor politik, sosial, budaya dan ekonomi, maka penentuan strategi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara faktor-faktor tersebut (<https://fiskal.kemenkeu.go.id> 2020).

Widodo (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan Otonomi Khusus berpengaruh negatif terhadap efisiensi belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik (Widodo 2019). Juliarini (2019) melakukan penelitian untuk mengukur kinerja pendapatan daerah terhadap IPM provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan sangat kuat antara pendapatan daerah dengan IPM di semua provinsi di Jawa.

Jalil & Kamaruddin (2018) mengatakan bahwa rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, harapan hidup, dan PDB per kapita menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan pengeluaran kesehatan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap IPM. Penelitian di 281 kota tingkat prefektur di China menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap efisiensi keuangan di wilayah lokal, bergantung pada kesimetrisan antara desentralisasi pengeluaran fiskal dan desentralisasi pendapatan (Liu et al. 2016). Bellofatto & Befamille (2018) telah mempelajari derajat optimal desentralisasi fiskal dalam suatu federasi. Pemerintah daerah dicirikan oleh kemampuannya mengirimkan barang publik (kapasitas administratif) dan kemampuan meningkatkan pendapatan pajak (kapasitas fiskal). Dalam desentralisasi parsial, pemerintah daerah mengandalkan dana talangan dari pusat untuk menyelesaikan proyek daerah dalam hal kebutuhan pembiayaan. Dalam desentralisasi penuh, pembiayaan marjinal dicapai melalui pajak. Dikatakan bahwa keberadaan tingkat kapasitas administratif yang cukup rendah merupakan syarat yang diperlukan untuk dominasi desentralisasi secara penuh (Bellofatto & Besfamille 2018).

Adam et al. (2014) menyimpulkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal, semakin menguntungkan efisiensi sektor publik dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Sow & Razafimahefa (2015) yang menyimpulkan antara lain bahwa di negara maju, desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan dalam pembangunan dan negara terbelakang, desentralisasi fiskal berdampak negatif pada efisiensi (Arends 2020). Kesimpulan keseluruhannya adalah bahwa bahaya desentralisasi sangat relevan dengan penyediaan layanan publik di daerah, walaupun ada bukti yang mendukung desentralisasi dan skeptis tentang desentralisasi. Ketika mendesentralisasikan layanan publik, para reformis harus mengetahui kekhususan layanan publik, konteks lokal, dan pengaruh desain hubungan fiskal. Jika ada yang salah, sentralisasi harus menjadi pilihan.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Seleksi dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan antara data *cross-section* Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan data series Dana Otsus tahun 2010-2017 yang diambil dari laman DJPK Kementerian Keuangan, yaitu data Realisasi APBD Provinsi di Indonesia. Jika terdapat bagian yang tidak tersedia, data dilengkapi dengan informasi yang ada pada laman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, atau laman Badan Pusat Statistik. Data yang diperoleh adalah data tahun 2010-2017. Data IPM diperoleh dari laman BPS. Data pendukung analisis berupa data wilayah dan kependudukan diperoleh dari laman kedua provinsi dan data lain yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu penelitian sebelumnya, buku, laporan, dan sumber-sumber lainnya. Data Dana Otsus dan IPM untuk kedua provinsi tersaji dalam Tabel 3 berikut.

Table 3. Dana Otsus dan IPM Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2010--2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, diproses

PROVINSI PAPUA		TAHUN						
KOMPUNEN PENDAPATAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dana Otsus (Trilyun Rp)	3,494	3,957	4,720	4,927	6,777	7,636	7,947	8,205
IPM (skala 1 sd 100)	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25	58.05	59.09
PROVINSI PAPUA BARAT		TAHUN						
KOMPUNEN PENDAPATAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dana Otsus (Trilyun Rp)	1,818	2,056	2,182	2,409	2,672	3,021	3,174	3,273
IPM (Skala 1 sd 100)	59.6	59.9	60.3	60.91	61.28	61.73	62.21	62.99

#### 3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (Dana Otsus), dan Belanja Modal (BM\_ sebagai variable bebas/prediktor, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variable terikat/respon.

- Dana Otonomi Khusus adalah dana bantuan hibah pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi tertentu. Dana otsus diberikan pemerintah pusat sebagai konsekuensi status otonomi khusus.
- Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dari sisi pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Model penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = C + a.X + e,$$

dimana C = konstanta

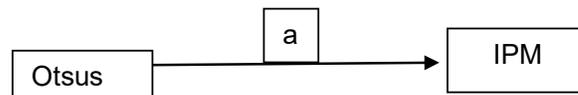
Y = IPM, sebagai variable terikat/respon

X = Dana Otsus, sebagai variable bebas/prediktor

e = kesalahan

Berdasarkan persamaan di atas, akan dianalisis bagaimana arah hubungan antara Dana Otsus terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan berapa besarnya pengaruh hubungan tersebut. Model hubungan antara variable-variabe tersebut dapat digambarkan dengan Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Hubungan antara variable bebas dan variable terikat



### 3.3. Metode Analisis data

Terhadap data panel yang diperoleh, dilakukan regresi linier sederhana. Sebelum dilakukan regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Asumsi ini harus terpenuhi agar hasil estimasi parameter tidak bias dan memberikan hasil pengujian hipotesis yang tepat. Uji Normalitas dilakukan untuk memperlihatkan apakah data terdistribusi normal. Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan syaratnya terpenuhi maka dilakukan proses regresi untuk memperoleh modelnya.

Uji Autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Uji heteroskedastisitas dilakukan secara visualisasi, untuk melihat plot antarresidual dan prediksi tidak membentuk pola tertentu, namun menyebar secara homogen. Uji hipotesis regresi linier dilakukan dengan Uji F. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi literatur dan pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut.

### 4.1. Demografi Provinsi Papua dan Papua Barat

Provinsi Papua, sebagai bagian Negara Republik Indonesia, telah diberikan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2001. Alasannya adalah bahwa “pengelolaan dan penggunaan kekayaan alam Tanah Papua belum dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan standar hidup penduduk pribumi, sehingga, terjadi kesenjangan yang cukup besar antara Provinsi Papua dengan daerah-daerah lainnya, serta pelanggaran hak-hak dasar penduduk Papua.” Karena itu, tujuan Otonomi Khusus adalah untuk membantu Papua dan warga Papua menikmati standar hidup serta kesempatan seperti yang terdapat di daerah-daerah lain di Indonesia (World Bank & Australian Indonesia Partnership 2009).

Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sangat besar dan bervariasi, sehingga pembangunan ekonomi menghadapi tantangan luar biasa. Rintangan fisik berupa jarak yang sangat jauh, pegunungan yang curam, dataran rendah berawa-rawa, tanah yang rapuh, dan curah hujan musiman yang tinggi. Tantangan sosial berupa kepadatan penduduk yang rendah dan fragmentasi kebudayaan yang ekstrim. Penduduk asli Papua menggunakan 250 bahasa yang berbeda, dan memiliki kebudayaan yang unik, bahkan kadang saling bentrok satu sama lain (World Bank & Australian Indonesia Partnership 2009).

Provinsi Papua terletak di bagian barat New Guinea. Provinsi ini dikenal dengan nama Irian Barat dari tahun 1969 hingga 1973, kemudian diubah namanya menjadi Irian Jaya. Nama Irian Jaya diubah menjadi Papua dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (BPKAD Provinsi Papua 2017).

Pada tahun 2004, Papua dibagi menjadi dua provinsi. Wilayah bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian barat menjadi Irian Jaya Barat yang kini menjadi Provinsi Papua Barat. Luas wilayah Provinsi Papua 420.540 km<sup>2</sup>, terbagi menjadi 29 kabupaten, diantaranya Kabupaten Asmat, Puncak Jaya, dan Sentani. Penduduk asli Papua terdiri atas 255 suku yang memiliki berbagai Bahasa yang berbeda-beda. Suku-suku tersebut adalah Amungme, Asmat, Biak, Dani, Waropen, Korowai, Sentani, dll (BPKAD Provinsi Papua 2017). Provinsi yang kaya emas ini hanya berpenduduk 3,15 juta jiwa pada tahun 2015. Rasio ketergantungan penduduk Papua pada tahun 2015 sebesar 45,16%. Artinya, setiap 100 penduduk usia kerja memiliki 45 orang tanggungan yang belum produktif dan belum produktif (<https://databoks.katadata.co.id> 2018). Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, jumlah penduduk di Provinsi Papua pada tahun 2018 mencapai 3,3 juta jiwa, yang terdiri dari 1,73 juta laki-laki dan 1,57 juta perempuan. Penduduk muda (0-34 tahun) mendominasi lebih dari 71% penduduk.

Provinsi Papua Barat (Pabar) terletak di ujung barat pulau Papua, dengan ibukota Sorong. Provinsi Papua Barat memiliki luas wilayah 115.363 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 12 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Sorong. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang berstatus otonomi khusus. Provinsi Papua Barat, meskipun telah menjadi provinsi tersendiri, tetap mendapat perlakuan khusus seperti provinsi sebelumnya (<https://papuabarprov.go.id> 2020.)

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, jumlah penduduk Papua Barat sebanyak 963.600 jiwa pada tahun 2019. Jumlah tersebut terdiri dari 457.200 perempuan dan 506.400 laki-laki. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 656 ribu jiwa (68%) dari total penduduk. Sedangkan penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun) sebanyak 277 ribu jiwa dan penduduk tidak produktif (di atas 65 tahun) sebanyak 31 ribu jiwa. (katadata.co.id). Papua Barat termasuk dalam 3 provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Gorontalo. Ketiga provinsi tersebut merupakan daerah hasil pemekaran daerah (<https://databoks.katadata.co.id> 2018).

#### 4.2. Hasil Pengolahan Data

##### a. Uji Normalitas

Dari uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk (Lampiran 1) diperoleh hasil bahwa untuk kedua variable (Otsus dan IPM) pada kedua wilayah (Papua dan Papua Barat) memiliki nilai p-value > 0,05 sehingga disimpulkan bahwa data variable yaitu Dana Otsus dan IPM di Papua dan Papua Barat terdistribusi normal.

##### b. Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (Lampiran 2), dengan memerhatikan nilai d, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat autokorelasi positif maupun autokorekasi negative, baik di Provinsi Papua maupun di Papua Barat.

##### c. Uji heteroskedastisitas

Lampiran 3 menunjukkan hasil bahwa data dan garis prediksi menyebar secara homogen sehingga memenuhi homoskedastisitas.

Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas telah memenuhi persyaratan sehingga model memenuhi kriteria BLUE (*best linear unbiased estimator*). Langkah selanjutnya adalah melakukan proses regresi linier sederhana.

#### 4.3. Regresi linier berganda

Proses regresi linier berganda menunjukkan hasil sebagaimana Lampiran 4, dengan hasil persamaan regresi linier yang diperoleh sebagai berikut.

$$\text{Provinsi Papua: } Y = 52,318 + 0,001 X + e$$

$$\text{Provinsi Pabar: } Y = 56,145 + 0,002 X + e$$

Uji regresi melalui uji F menunjukkan bahwa nilai  $F(0,000) < 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa model yang terbentuk dapat dipergunakan untuk memprediksi.

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat dijawab pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Dana Otsus memiliki arah hubungan yang positif terhadap IPM, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat, artinya jika Dana Otsus meningkat maka IPM juga meningkat.
- b. Setiap peningkatan Dana Otsus sebesar Rp1 trilyun, di Provinsi Papua akan meningkatkan IPM 0,001 skala, sementara di Provinsi Papua Barat meningkatkan IPM sebesar 0,002 skala.

Pengaruh setiap peningkatan satuan Dana Otsus terhadap IPM di Provinsi Papua Barat memberikan peningkatan IPM yang sangat kecil. Pengaruh yang kecil ini dapat disebabkan oleh faktor geografis, demografis, dan sosiologis di wilayah ini. Dari sisi luas wilayah, wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sangat besar dan bervariasi, sehingga pembangunan menghadapi tantangan luar biasa. Rintangan jarak yang sangat jauh dan sulit dijangkau, pegunungan yang curam, dataran rendah berawar-rawa, tanah yang rapuh, serta kepadatan penduduk yang rendah dan fragmentasi kebudayaan yang ekstrim menjadi tantangan besar dalam pembangunan di tanah Papua.

Jika dibandingkan antara Papua dan Papua Barat, dengan peningkatan dana otsus yang sama (misal Rp1 trilyun), peningkatan IPM di Papua Barat lebih tinggi dari pada di Provinsi Papua. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi alam Provinsi Papua yang lebih berat dibandingkan Papua Barat, luas wilayah Provinsi Papua (420.540 km<sup>2</sup>) jauh lebih besar dibandingkan luas wilayah Papua Barat (115.363 km<sup>2</sup>). Jumlah penduduk tahun 2019 Provinsi Papua (3,3 juta jiwa) juga jauh lebih banyak dari penduduk Provinsi Papua Barat (0,963 juta), dan jumlah kabupaten/kota di Papua (29 kab/kota) mencapai dua kali lipat lebih daripada jumlah kabupaten/kota di Papua Barat (13 kab/kota). Selain faktor-faktor tersebut, kemungkinan juga terdapat faktor-faktor lain yang membedakan performa capaian IPM atas kedua wilayah tersebut.

## 5. KESIMPULAN

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat akan berakhir tahun 2021. Studi ini menunjukkan bahwa dana otonomi khusus memiliki hubungan yang positif dengan IPM, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat, namun nilainya sangat kecil. Kecilnya pengaruh dana otsus terhadap IPM dapat disebabkan oleh faktor geografis, demografis, dan sosiologis di tanah Papua ini. Setiap satuan peningkatan dana Otsus, di Provinsi Papua Barat akan meningkatkan IPM yang lebih besar dari pada di Provinsi Papua. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi alam daerah, budaya masyarakat, alokasi anggaran belanja, kinerja Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi peluang untuk penelitian berikutnya dengan memasukkan variabel-variabel yang belum diteliti dan dengan data untuk rentang waktu yang lebih lama.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini hanya mengukur variabel jumlah dana otonomi khusus saja. Pada penelitian berikutnya dapat dimasukkan variabel-variabel lain, baik variabel kuantitatif maupun kualitatif agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh terkait pemanfaatan dan optimalisasi dana otonomi khusus dan hal-hal terkait pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat.

### Penghargaan

Terima kasih khusus penulis ucapkan untuk Ananda Abdullah Syafiq Edyanto atas kontribusinya dalam pengolahan data dan sebagai teman diskusi. Terima kasih pula kepada Pusdiklat Pajak dan BPPK yang telah menyelenggarakan acara Seminar Nasional Keuangan Negara 2020, sehingga paper ini dapat terpublikasi dan semoga memberi manfaat bagi negeri tercinta.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., Delis, M., & Kammas, P. (2014). Fiscal Decentralization and Public Sector Efficiency: Evidence from OECD Countries. *Economics of Governance*, 15(1), 17–49. <https://doi.org/DOI: 10.1007/s10101-013-0131-4>
- Adyani, & Wigiastuti. (2018). Studi Komparatif: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sarbagita Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1111–1141. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p20>
- Agus, P. (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1(1), 20-36.
- Arends, H. (2020). The Dangers of Fiscal Decentralization and Public Service Delivery: A Review of Arguments. *Polit Vierteljahresschr.* <https://doi.org/10.1007/s11615-020-00233-7>
- Badan Pusat Statistik. (2017, November 20). *Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi (juta rupiah), 2006—2016*. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1181/rekapitulasi-realisasi-penerimaan-dan-pengeluaran-pemerintah-daerah-provinsi-juta-rupiah-2006-2016.html>,
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2017 Financial Statistics of Province Government 2014-2017*. Badan Pusat Statistik BPS—Statistics Indonesia.
- Bellofatto, A., & Besfamille, M. (2018). Regional State Capacity and the Optimal Degree of Fiscal Decentralization. *Journal of Public Economics*, 159, 225–243. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.12.010>
- Biggeri, M., & Mauro, V. (2018). Towards a more ‘Sustainable’ Human Development Index: Integrating the environment and freedom. *Ecological Indicators*, 91, 220–231. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.03.045>
- BPKAD Provinsi Papua. (2017). *Penerimaan Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. <https://bpkad.papua.go.id/page/31/penerimaan-amp-engalokasian-dana-otsus-papua.html>
- <https://databoks.katadata.co.id>. (n.d.). *Penduduk Papua Diprediksi Berjumlah 3,3 Juta pada 2018*. Retrieved January 9, 2020, from

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/01/penduduk-papua-diprediksi-berjumlah-33-juta-pada-2018>
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id>. (2020). *Kajian Efektivitas Implementasi Dana Otonomi Khusus*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=2019091709450632855111>
- <https://papuabaratprov.go.id>. (2020.). *Sekilas Papua Barat*. Retrieved January 9, 2020, from <https://papuabaratprov.go.id/sekilas-papua-barat/>
- Iskandar, A., & Subekan, A. (2014). Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012). *Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*, I(Jakarta), 79--101.
- Juliarini, A. (2019). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa. *Good Governance*, 15(1). <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.99>
- Kusriyawanto. (2014). Pengaruh Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2010. *E-Jurnal Katalogis*, 2 Nomor 7(2014), 111-123.
- Liu, J., Hu, X., & Tang, H. (2016). Fiscal Decentralization and Regional Financial Efficiency: An Empirical Analysis of Spatial Durbin Model. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2016, 1-14. <https://doi.org/10.1155/2016/6597138>
- Melliana, A., Zain, I., & Hakin, J. A. R. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*, 2(2), 6.
- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 33 UU (2004).
- Rusydi, Sabilila, D., Kusuma, W., & Totalia, S. (2015). Analisis Efisiensi Relatif Penggunaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012. *Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Tata Niaga Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta*. <http://download.portalgaruda.org/article.php>
- Sangh, S. (2016). Determinants of Human Development Index: A Cross-Country Empirical Analysis. *SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS)*, 3(7).
- Sow, M., & Razafimahefa, I. (2015). *Fiscal Decentralization and the Efficiency of Public Service Delivery* [Working Paper No. 15/59]. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Fiscal-Decentralization-and-the-Efficiency-of-Public-Service-Delivery-42789>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Vol. 5). Alfabeta.
- Supranto, J. (2009). *Statistik Teori dan Aplikasi* (7th ed.). Erlangga.
- Swan Statistik. (2020, September 23). *Analisis Data Kualitatif & Kuantitatif* [Bahan tayang]. International Conference dan Bimbingan Teknis # 5, Universitas Muhamadiyah Enrekang.
- UNDP. (2019). *Overview Human Development Report 2019 Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century*. United Nations Development Programme.

- World Bank, T., & Australian Indonesia Partnership. (2009). *Indonesia-Berinvestasi untuk Masa Depan Papua & Papua Barat, Infrastruktur untuk Pembangunan yang Berkelanjutan*. Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/678021468259476837/Indonesia-Investing-in-the-future-of-Papua-and-West-Papua-infrastructure-for-sustainable-development>
- Yuliani, T. (2015). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur. *Jejak*, 8 (1)(2015), 1–88. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1>

## LAMPIRAN

### HASIL OLAH DATA STATISTIK “OTSUS dan IPM , PAPUA dan PABAR”

#### Lampiran 1. Uji Normalitas (p value)

		Tests of Normality					
		Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Provinsi	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
OTSUS	Papua	.225	7	.200*	.901	7	.337
	Papua Barat	.149	7	.200*	.956	7	.782
IPM	Papua	.120	7	.200*	.982	7	.969
	Papua Barat	.143	7	.200*	.964	7	.851

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

*Interpretasi: nilai signifikansi Shapiro-Wilk seluruh variabel (p-value) >0,05, berarti data terdistribusi normal*

#### Lampiran 2. Uji Autocorrelation

##### Papua

Model Summary <sup>b,c</sup>							
Model	R		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson Statistic	
	Provinsi = Papua (Selected)	Provinsi ~ = Papua (Unselected)				Provinsi = Papua (Selected)	Provinsi ~ = Papua (Unselected)
1	.969 <sup>a</sup>	.992	.939	.927	.34496	2.210	.002

a. Predictors: (Constant), OTSUS

b. Unless noted otherwise, statistics are based only on cases for which Provinsi = Papua.

c. Dependent Variable: IPM

Catatan Perhitungan:  $T=7$   $K=2$  ;  $dL=0,699$  ;  $dU=1,35635$  ;  $d= 2.210$ ;  $4-d=1,79$

**Deteksi Autokorelasi Positif:**

Jika  $d < dL$  maka terdapat autokorelasi positif, **false**

Jika  $d > dU$  maka **tidak terdapat autokorelasi positif**, **true**

Jika  $dL < d < dU$  maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. **false**

**Deteksi Autokorelasi Negatif:**

Jika  $(4 - d) < dL$  maka terdapat autokorelasi negatif, **false**

Jika  $(4 - d) > dU$  maka **tidak terdapat autokorelasi negatif**, **true**

Jika  $dL < (4 - d) < dU$  maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. **false**

**Papua Barat**

Model	R		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson Statistic	
	Provinsi = Papua Barat (Selected)	Provinsi ~= Papua Barat (Unselected)				Provinsi = Papua Barat (Selected)	Provinsi ~= Papua Barat (Unselected)
1	.992 <sup>a</sup>	.969	.984	.981	.13179	2.060	.014

a. Predictors: (Constant), OTSUS

b. Unless noted otherwise, statistics are based only on cases for which Provinsi = Papua Barat.

c. Dependent Variable: IPM

$T=7$   $K=2$  ;  $dL=0,699$ ;  $dU =1,35635$ ;  $d= 2.060$  ;  $4-d=1,940$

**Deteksi Autokorelasi Positif:**

Jika  $d < dL$  maka terdapat autokorelasi positif, **false**

Jika  $d > dU$  maka **tidak terdapat autokorelasi positif**, **true**

Jika  $dL < d < dU$  maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. **false**

**Deteksi Autokorelasi Negatif:**

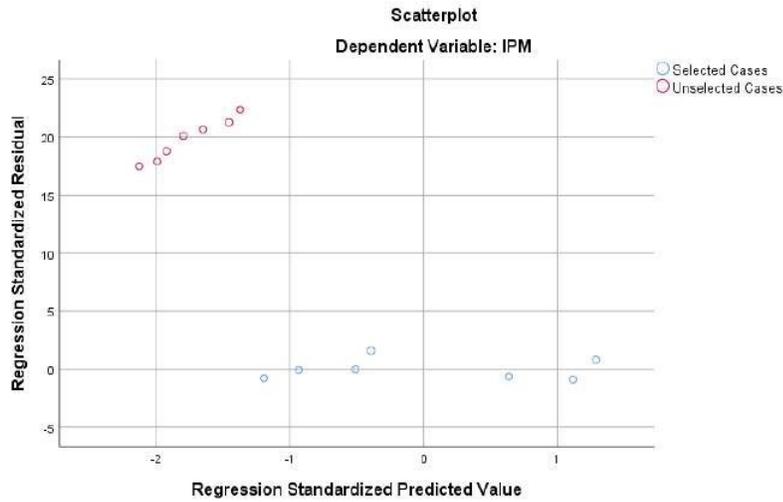
Jika  $(4 - d) < dL$  maka terdapat autokorelasi negatif, **false**

Jika  $(4 - d) > dU$  maka **tidak terdapat autokorelasi negatif**, **true**

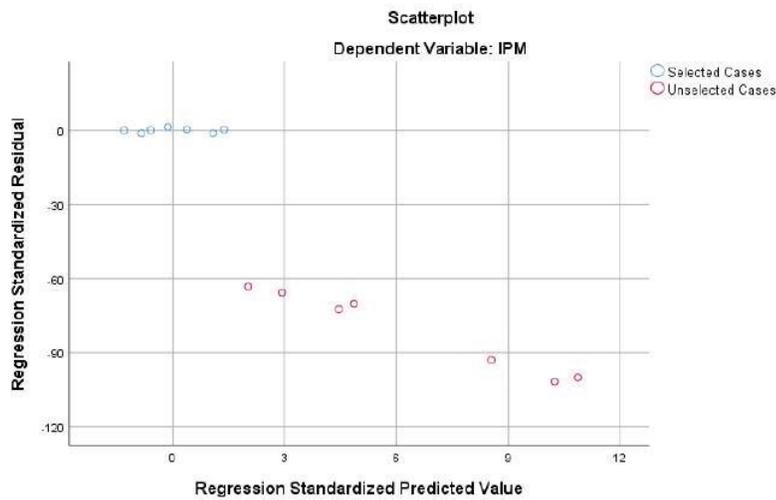
Jika  $dL < (4 - d) < dU$  maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. **false**

**Lampiran 3. Uji Heterosdastisitas**

**Papua**



Papua Barat



Lampiran 4. Persamaan Regresi Linier

Papua

**Model Summary<sup>b,c</sup>**

Model	Provinsi = Papua (Selected)	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
						Provinsi ~ Papua (Unselected)	R Square Change	F Change	df1	df2
1	.969 <sup>a</sup>	.992	.939	.927	.34496	.939	76.768	1	5	.000

a. Predictors: (Constant), OTSUS

b. Unless noted otherwise, statistics are based only on cases for which Provinsi = Papua.

c. Dependent Variable: IPM

**ANOVA<sup>a,b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.135	1	9.135	76.768	.000 <sup>c</sup>
	Residual	.595	5	.119		
	Total	9.730	6			

a. Dependent Variable: IPM

b. Selecting only cases for which Provinsi = Papua

c. Predictors: (Constant), OTSUS

**Coefficients<sup>a,b</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	52.318	.460		113.634	.000
	OTSUS	.001	.000	.969	8.762	.000

a. Dependent Variable: IPM

b. Selecting only cases for which Provinsi = Papua

*Catatan: Persamaan Regresi Papua:  $Y = 52,318 + 0,001 X$*

### Regresi Papua Barat

**Model Summary<sup>b,c</sup>**

Model	Provinsi = Papua Barat (Selected)	R	Provinsi ~ Papua Barat (Unselected)	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. Char
								F Change	df1	df2	
1		.992 <sup>a</sup>	.969	.984	.981	.13179	.984	316.271	1	5	

a. Predictors: (Constant), OTSUS

b. Unless noted otherwise, statistics are based only on cases for which Provinsi = Papua Barat.

c. Dependent Variable: IPM

**ANOVA<sup>a,b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.493	1	5.493	316.271	.000 <sup>c</sup>
	Residual	.087	5	.017		
	Total	5.580	6			

a. Dependent Variable: IPM

b. Selecting only cases for which Provinsi = Papua Barat

c. Predictors: (Constant), OTSUS

**Coefficients<sup>a,b</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	56.145	.269		208.664	.000
	OTSUS	.002	.000	.992	17.784	.000

a. Dependent Variable: IPM

b. Selecting only cases for which Provinsi = Papua Barat

*Catatan : Persamaan regresi Linier Papua Barat:  $Y=56,145 + 0,002X$*